

2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



MARGONO, S.Sos., M.Si

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN ROKAN HULU**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Instansi Pemerintah Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2020. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD dan APBD-P Tahun anggaran 2020 Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu mengelola anggaran sebesar **Rp. 4.956.185.546,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.173.710.000,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.782.475.546,00**. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar 99,24% dengan penyerapan dana sebesar **Rp. 4.874.369.067,00**. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan 6 program dan 21 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2020 adalah **Realisasi Fisik** sebesar 99,95%.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata

capaian dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.

Dalam pelaksanaan tugasannya, Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten rokan Hulu masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan perangkat regulasi dari pemerintah Pusat yang belum lengkap dan kurangnya jumlah SDM di lingkungan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasir Pengaraian, Januari 2021

**Kepala DPMPD
Kabupaten Rokan Hulu,**

**MARGONO, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19710705 199203 1 006**

DAFTAR ISI

<i>IKHTISAR EKSEKUTIF</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>v</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>vi</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
<i>A. MAKSUD DAN TUJUAN</i>	<i>1</i>
<i>A.2 Tujuan Laporan</i>	<i>1</i>
<i>B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI</i>	<i>1</i>
<i>B.1 Kedudukan</i>	<i>2</i>
<i>B.2 Tugas</i>	<i>2</i>
<i>B.3 Fungsi</i>	<i>2</i>
<i>C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</i>	<i>4</i>
<i>D. ISU STRATEGIS</i>	<i>4</i>
<i>BAB II</i>	<i>6</i>
<i>PERENCANAAN KINERJA</i>	<i>6</i>
<i>A. INDIKATOR KINERJA UTAMA</i>	<i>6</i>
<i>B. PERJANJIAN KINERJA</i>	<i>8</i>
<i>BAB III</i>	<i>10</i>
<i>AKUNTABILITAS KINERJA</i>	<i>10</i>
<i>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</i>	<i>10</i>
<i>A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020</i>	<i>10</i>
<i>A.2 Realisasi Kinerja Sasaran tahun 2019 dan 2020</i>	<i>12</i>
<i>A.3 Realisasi Kinerja Sasaran tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)</i>	<i>13</i>
<i>A.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis</i>	<i>14</i>
<i>A.5 Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran</i>	<i>19</i>
<i>B. REALISASI ANGGARAN</i>	<i>21</i>

<i>BAB IV</i>	26
<i>PENUTUP</i>	26
<i>LAMPIRAN</i>	28
<i>A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020</i>	28
<i>B. REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN</i>	28
<i>C. LAMPIRAN SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA</i>	28
<i>D. RENCANA PROGRAM TAHUN 2020</i>	28
<i>E. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020</i>	28
<i>F. MONITORING PROGRAM TAHUN 2020</i>	28
<i>G. MONITORING RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020</i>	28
<i>H. EVALUASI PROGRAM TAHUN 2020</i>	28
<i>I. MATRIK PELAKSANAAN RENCANA AKSI</i>	28
<i>J. MONITORING EVALUASI CAPAIAN TARGET RENCANA AKSI</i>	28
<i>K. MONITORING TERHADAP PENGUKURAN CAPAIAN TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA</i>	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama	7
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020	11
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020	12
Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 ..	13
Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Sasaran 1	15
Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Sasaran 2.....	16
Tabel 3. 6 Realisasi Indikator Sasaran 3.....	17
Tabel 3. 7 Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis	20
Tabel 3. 8 Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020	22
Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	24
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2020	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu 3

Gambar 3. 1 Kebutuhan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola oleh Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas setiap bulan.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu kepala Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan Type B dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

B.1 Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

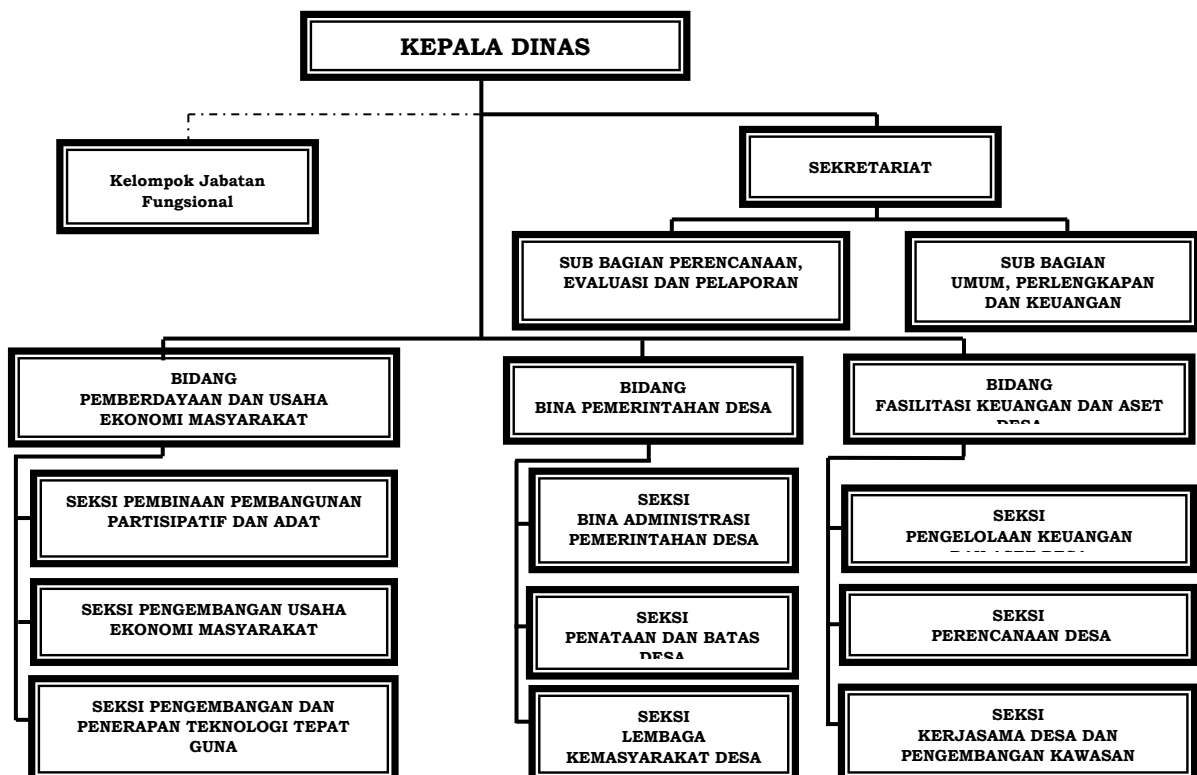
B.3 Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Fasilitasi Keuangan Dan Aset Desa;
- b. Pelaksanaan Kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Fasilitasi Keuangan Dan Aset Desa;
- d. Pelaksanaan Administrasi pada pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Fasilitasi Keuangan Dan Aset Desa; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Adat;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 3. Seksi Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
- d. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Penataan dan Batas Desa; dan
 3. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 2. Seksi Perencanaan Desa; dan
 3. Seksi Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Pedesaan.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari aspek beban kerja tidak dapat terlepas dengan aspek kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus mampu menjabarkan terhadap tugas pokok sebagai fungsi pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pemerintahan desa. Untuk itu kemampuan aparatur harus selalu ditingkatkan guna pencapaian pelayanan yang baik didasarkan pada mekanisme yang ada.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan Program dan Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa namun dalam pelaksanaan capaian kinerja masih ada permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan TAPD sehingga masih terjadi ketidakselarasan sebagian *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
2. Belum terbangunnya sistem informasi data pemerintahan desa yang menyeluruh;
3. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa;
4. Belum optimalnya pembangunan Desa sebagai upaya menjaga pelestarian lingkungan hidup, ketahanan sosial, kearifan lokal, dan keutuhan wilayah; dan
5. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

D. ISU STRATEGIS

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa identifikasi masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain adalah belum optimalnya peran dan fungsi serta kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik, belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan, dan lemahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan yang terjadi atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya

dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan proses analisis identifikasi masalah yang menjadi faktor penghambat pelayanan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka dirumuskan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya pelaksanaan pembangunan di desa mempengaruhi infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan sehingga menimbulkan kondisi kurang pemberdayaan masyarakat di perdesaan.
2. Terbatas dan Lemahnya kinerja lembaga ekonomi di perdesaan menyebabkan kurangnya akses pengembangan ekonomi masyarakat di perdesaan.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di perdesaan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
4. Rendahnya Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa mengakibatkan rendahnya tata kelola manajemen dan administrasi pemerintahan desa.
5. Rendahnya kinerja kelembagaan dan organisasi perempuan dan rendahnya tingkat partisipasi perempuan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengampu urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendukung 1 (satu) misi Kabupaten Rokan Hulu yang tercantum pada RPJMD yaitu :

”Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat”.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebanyak 4 (empat) indikator :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2020		Ket.	
				TARGET	CAPAIAN		
Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya status desa	Jumlah kelembagaan teknologi tepat guna dan kelembagaan kemasyarakatan di desa yang dibina:					
		Kelembagaan TTG/ posyantek yang di bina	Posyan tekdes	14	14		
		Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	Peserta PKK	147	147		
			RT	2859	2859		
			RW	1185	1185		
		Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang difasilitasi	BUMDes	147	148		
		Jumlah pokjnal dan LPM yang diberdayakan:					
		Pokjnal posyandu di desa/kelurahan yang diberdayakan	Posyandu	581	581		
		LPM yang diberdayakan	BP SPAMS				
		Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas aparatur di desa:					
		Pembinaan penataan dan pengelolaan keuangan desa	Orang	441	441		
		RPJM Desa	Desa	153	153		
Pelaksanaan Pilkades Serentak	Desa	19	-	<i>tidak terlaksana, dilaksanakan tahun 2021</i>			

		Jumlah pembinaan otonomi desa:				
		Pembinaan aparatur pelaksana DD dan ADD	Orang	294	294	
		Pembinaan Potensi Desa	Desa	16	-	
		Pembinaan Aset Desa	Desa	139	139	
		Pembinaan Pengelolaan barang milik desa	Desa	-	-	Belum menjadi indikator kinerja tahun 2020

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2020 meliputi 4 sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 21 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya Status Desa	1	Jumlah Kelembagaan teknologi tepat guna dan kelembagaan masyarakat di desa yang dibina	%				0	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	Jumlah Kelembagaan Teknologi tepat guna dan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	
		-	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina.	80 Peserta PKK, Posyandu				0	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Peserta PKK dan Posyandu yang dibina	
		2	Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang di fasilitasi	%	100	100	100	100	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang di fasilitasi	
				147 Bumdes	147	147	147	147	Pengembangan BUMDes	Jumlah BUMDes yang berkembang	
		3	Jumlah pembinaan paningkatan kapasitas aparatur di desa :	%					0	Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah pembinaan paningkatan kapasitas aparatur di desa
		-	Pelaksanaan Pilkades serentak	19 Desa					0	Penyelenggaraan Pilkades	Jumlah Desa yg melaksanakan Pilkades Serentak
		4	Jumlah Pembinaan Otonomi Desa :	%		100				Program Pembinaan Otonomi Desa	Jumlah Pembinaan Otonomi Desa aparatur Pelaksana DD dan ADD
-	Pembinaan aparatur pelaksanaan DD dan ADD	139 Desa		139				Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penyusunan APBDes	Jumlah Desa Pelaksana ADD dan Penyusunan APBDes		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, Output, dan Outcome. Analisis pencapaian kinerja juga diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan dengan 6 Program serta 21 kegiatan (17 kegiatan rutin dan 4 kegiatan strategis). Semua kegiatan tersebut telah tertampung dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan tahun 2020.

A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
Capaian kinerja > 95 % sampai dengan 100 %	Sangat Berhasil
Capaian kinerja > 80 % sampai dengan 95 %	Berhasil
Capaian kinerja > 50 % sampai dengan 80 %	Cukup Berhasil
Capaian kinerja < 50 %	Kurang Berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Ket.	
		Satuan	Tahun 2020				
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya status desa	Jumlah kelembagaan teknologi tepat guna dan kelembagaan kemasyarakatan di desa yang dibina:						
	Kelembagaan TTG/ posyantek yang di bina	Posyantekdes	14	14	100%		
	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	Peserta PKK		147	147	100%	
		RT		2859	2859	100%	
		RW		1185	1185	100%	
	Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang difasilitasi	Bumdesa		147	148	100%	
	Jumlah pokjnal dan LPM yang diberdayakan:						
	Pokjnal posyandu di desa/kelurahan yang diberdayakan	Posyandu		581	581	100%	
	LPM yang diberdayakan	BP SPAMS		-	-	0%	Belum Menjadi Indikator
	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas aparatur di desa:						
	Pembinaan penataan dan pengelolaan keuangan desa	Orang		441	441	100%	
	RPJM Desa	Desa		153	153	100%	
	Pelaksanaan Pilkades Serentak	Desa		19	-	0%	Dikarenakan Wabah Covid-19
	Jumlah pembinaan otonomi desa:						
	Pembinaan aparatur pelaksana DD dan ADD	Orang		294	294	100%	
	Pembinaan Potensi Desa	Desa		16	-	0%	Belum Menjadi Indikator
	Pembinaan Aset Desa	Desa		139	139	100%	
Pembinaan Pengelolaan barang milik desa	Desa		-	-	0%	Belum Menjadi Indikator	

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk Capaian IKU Persentase temuan pemeriksaan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan baik Inspektorat Kabupaten maupun BPK, dan telah menyampaikan data-data yang diperlukan sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerjanya diperoleh nilai sebesar 100 %.

A.2 Realisasi Kinerja Sasaran tahun 2019 dan 2020

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang telah dicapai pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam renstra 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun keempat Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kelima untuk mengetahui kecenderungan meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			Realisasi Capaian		
		Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5		5	
Meningkatnya status desa	Jumlah kelembagaan teknologi tepat guna dan kelembagaan kemasyarakatan di desa yang dibina:						
	Kelembagaan TTG/ posyantek yang di bina	Posyantekdes	0	14	0%	100%	
	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	Peserta PKK		192	147	100%	100%
		RT		2507	2859	100%	100%
		RW		1005	1185	100%	100%
	Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang difasilitasi	Bumdesa	147	147	100%	100%	
	Jumlah pokjanal dan LPM yang diberdayakan:						
	Pokjanal posyandu di desa/kelurahan yang diberdayakan	Posyandu	306	581	100%	100%	
	LPM yang diberdayakan	BP SPAMS	0	0	0%	0%	
	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas aparatur di desa:						

Pembinaan penataan dan pengelolaan keuangan desa	Orang	441	441	100%	100%
RPJM Desa	Desa	153	153	100%	100%
Pelaksanaan Pilkades Serentak	Desa	0	19	0%	100%
Jumlah pembinaan otonomi desa:					
Pembinaan aparatur pelaksana DD dan ADD	Orang	294	294	100%	100%
Pembinaan Potensi Desa	Desa	-	16	0%	100%
Pembinaan Aset Desa	Desa	139	139	100%	100%
Pembinaan Pengelolaan barang milik desa	Desa	-	-	0%	0%

A.3 Realisasi Kinerja Sasaran tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)

Indikator kinerja sasaran Tahun 2020 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun kelima (2020) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2021) untuk mengetahui kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
		Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021 (Akhir Periode)	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya status desa	Jumlah kelembagaan teknologi tepat guna dan kelembagaan kemasyarakatan di desa yang dibina:				
	Kelembagaan TTG/ posyantek yang di bina	Posyantek des	14	14	
	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	Peserta PKK		147	147
		RT		2859	2859
		RW		1185	
	Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang difasilitasi	Bumdesa		147	148

Jumlah pokjnal dan LPM yang diberdayakan:			
Pokjnal posyandu di desa/kelurahan yang diberdayakan	Posyandu	581	581
LPM yang diberdayakan	BP SPAMS	0	0
Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas aparatur di desa:			
Pembinaan penataan dan pengelolaan keuangan desa	Orang	441	441
RPJM Desa	Desa	153	153
Pelaksanaan Pilkades Serentak	Desa	19	-
Jumlah pembinaan otonomi desa:			
Pembinaan aparatur pelaksana DD dan ADD	Orang	294	294
Pembinaan Potensi Desa	Desa	16	16
Pembinaan Aset Desa	Desa	139	139
Pembinaan Pengelolaan barang milik desa	Desa	-	-

A.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 belum sepenuhnya terealisasi 100 %, sedangkan tingkat capaian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap target lima Tahun 2021 juga masih bervariasi, dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

A.4.1 Sasaran 1 : Meningkatkan Status Desa

Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya Status Desa** melalui 4 (empat) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian sebesar 99,52% dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sabagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah kelembagaan teknologi tepat guna dan kelembagaan kemasyarakatan di desa yang dibina.

Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	145	0	0%
Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang difasilitasi.	147 BUMDesa/BUEK	148 BUMDesa/BUEK	100,68%

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator 1 (satu) tersebut dengan program sebanyak 2 (dua) yaitu persentase unit usaha yang terbentuk sudah mencapai target dengan realisasi sebanyak 148 BUMDesa yang terbentuk, sehingga capaiannya mencapai 100,68% dari target 147 BUMDesa, menjadi 148 BUMDesa. Dengan demikian, Indikator 1 “Jumlah Unit Usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang Difasilitasi” mendapatkan predikat sangat berhasil. Untuk program “Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan” dengan Capaian 0% dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak memadai untuk melakukan program kegiatan tersebut. Kendala program ini yakni dengan mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2020 sehingga menunda program kegiatan tersebut.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Tersedianya anggaran yang cukup serta tepat waktu.
2. Koordinasi yang aktif baik di Internal Dinas maupun dengan Eksternal baik dengan kecamatan maupun di desa.

Hambatan/ kendala sasaran ini adalah :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana mobilitas.
- b. mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dilapangan.

Strategi Pemecahan masalah :

- 1. Memanfaatkan dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada.
- 2. Meningkatkan koordinasi diInternal Dinas, maupun dengan Masyarakat dan desa.

Untuk pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara membandingkan antara penyerapan anggaran dengan hasil keluaran kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan 1 kegiatan, anggaran Rp. 1,653,808,800.00 terealisasi sebesar Rp. 1,645,676,281.00 dengan penyerapan sebesar 99.51%.

Indikator 2 : Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas aparatur di desa.

Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
Pelaksanaan Pilkades Serentak	19 Desa	-	0 %

Hasil evaluasi capaian kinerja Indikator 2 (Dua) tersebut dengan program sebanyak 1 (satu) yakni Pelaksanaan pilkades serentak realisasi 0 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0 %. Skala pengukuran capaian kinerja indikator 2 hasil penilaian capaian kinerja tahun 2020 sebesar 0 %, ditahun 2020 tidak ada pelaksanaan Pilkades serentak dikarenakan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

tidak terlaksananya kegiatan tersebut dikarenakan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4528/SJ Tahun 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), sehingga tidak dapat melaksanakan program kegiatan tersebut dilapangan.

Hambatan/ kendala sasaran ini adalah :

Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga tidak dapat melaksanakan program kegiatan pelaksanaan pilkades serentak dilapangan.

Strategi Pemecahan masalah :

1. Memanfaatkan dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada.
2. Meningkatkan koordinasi diInternal Dinas, maupun dengan Masyarakat dan desa.

Untuk pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara membandingkan antara penyerapan anggaran dengan hasil keluaran kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan 1 kegiatan, anggaran Rp. 0 terealisasi sebesar Rp.0 dengan penyerapan sebesar 0%.

Indikator 3 : Jumlah pembinaan otonomi desa.

Tabel 3. 6 Realisasi Indikator Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
Pembinaan aparatur pelaksana DD dan ADD	294 Orang	294 Orang	100 %

Anggaran Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa dan Penyusunan APBDesa adalah merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan Alokasi Dana

Desa dan penyusunan APBDesa. ADD adalah merupakan sumber Pendapatan desa yang berasal dari Dana perimbangan yang diserahkan kepada Desa, ADD harus dimasukkan kedalam APBDesa dan harus jelas penggunaannya dan harus di pertanggungjawabkan.

Tujuan Kegiatan ini adalah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Penyusunan APBDesa bertujuan agar Kepala Desa mempunyai pemahaman yang sama tentang penerapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Penyusunan APBDesa serta mempunyai keseragaman dalam penggunaan format lampiran pendukung yang diperlukan.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator 3 (tiga) tersebut dengan program sebanyak 1 (satu) yaitu persentase indikator sudah mencapai target dengan realisasi sebanyak 139 Desa / 294 Orang sudah Terfasilitasi Pelaksanaan ADD dan Penyusunan APBDes, sehingga capaiannya 100% dari target 139 Desa / 294 Orang. Dengan demikian, Indikator 3 “Jumlah pembinaan otonomi desa” mendapatkan predikat sangat berhasil.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

Meningkatnya tertib administrasi di Bidang Keuangan dan Aset Desa.

Hambatan/ kendala sasaran ini adalah :

Kurangnya Sumber Daya Manusia pada masing-masing bagian dalam penyusunan laporan kegiatan.

Strategi Pemecahan masalah :

1. Memanfaatkan dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada.
2. Mendorong di masing-masing bagian untuk menyusun laporan kegiatan/pertanggungjawaban secara tertib dan tepat waktu.

Untuk pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara membandingkan antara penyerapan anggaran dengan

hasil keluaran kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

Program pembinaan otonomi desa dengan 1 kegiatan, anggaran Rp. 51,990,300.00 terealisasi sebesar Rp. 51,990,300.00 dengan penyerapan sebesar 100 %.

A.5 Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2020 dengan berbagai kendala. Salah satu kendalanya yakni mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui :

1. *Perbandingan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.*

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata –rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata – rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata – rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran dari rencana pembiayaan dalam pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran tahun 2020 sebesar Rp. 1,705,799,100.00 dengan realisasi anggaran Rp. 1,697,666,581.00 untuk mencapai sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 99,52%, masuk kategori **efisien**.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Status Desa.	99,52%%	1,705,799,100.00	1,697,666,581.00	99,52%	Efisien
JUMLAH			1,705,799,100.00	1,697,666,581.00	99,52%	Efisien

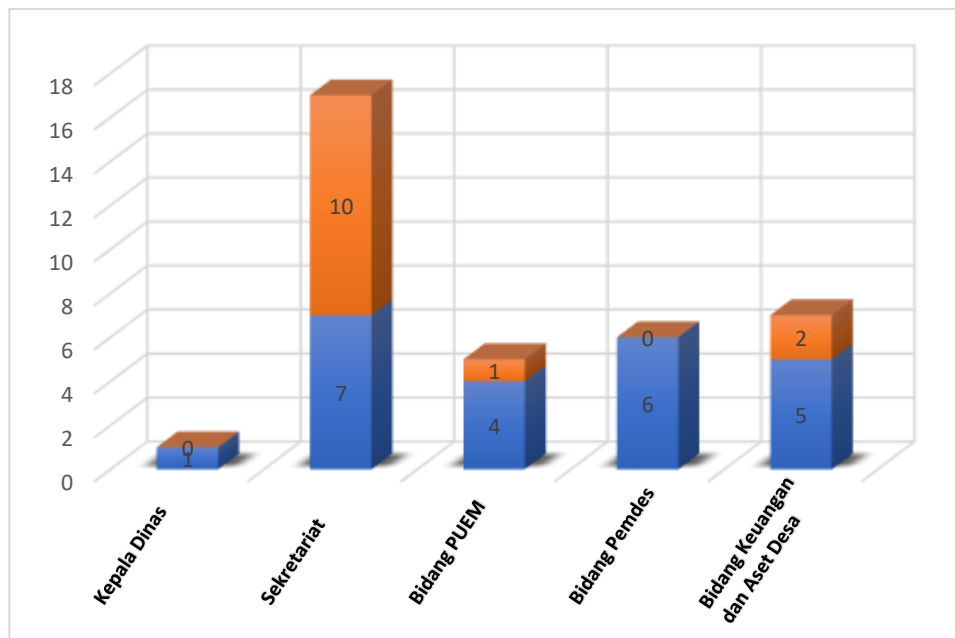
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dicapai melalui perbandingan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil analisa kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, kebutuhan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebanyak 40, namun kinerja 40 pegawai tersebut dapat ditangani oleh 22 orang pegawai ditambah dengan 13 tenaga teknis honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan tenaga teknis yang telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dengan ketugasan melaksanakan pengadministrasian umum, sehingga terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya sebanyak 18 orang. Namun efisiensi ini berimplikasi pada pemaksimalan SDM untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun

kebijakan pendistribusian pegawai.

Gambar 3. 1 Kebutuhan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



3. Efesiensi anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan APBD dan APBD-PP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2020 tidak ada Pengadaan barang dan jasa dikarenakan Efesiensi anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai APBD-P tahun angran 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu mengelola anggaran sebesar Rp. 4,722,480,546.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,173,710,000.00 dan Belanja Langsung Rp. 2,548,770,546.00. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar 99,24% dengan

penyerapan dana sebesar Rp 2,529,403,375,00, dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2,111,260,692.00 atau sebesar 97,13%. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan 6 program dan 21 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2020 realisasi fisik rata-rata sebesar 99,95% dan realisasi keuangan sebesar 99,24%.

Tabel dari realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020

No	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,780,000.00	100.00	100.00	Effisien
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54,780,000.00	100.00	82.26	Effisien
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12,600,000.00	89.36	89.36	Effisien
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65,831,296.00	100.00	100.00	Effisien
5	Penyediaan alat tulis kantor	68,432,000.00	100.00	100.00	Effisien
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26,948,000.00	100.00	100.00	Effisien
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,928,650.00	100.00	100.00	Effisien
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,215,000.00	100.00	100.00	Effisien
9	Penyediaan bahan logistik kantor	29,478,000.00	100.00	99.99	Effisien
10	Penyediaan makanan dan minuman	26,390,000.00	100.00	100.00	Effisien
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	111,240,000.00	100.00	100.00	Effisien

12	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	63,690,000.00	100.00	100.00	Effisien
13	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	130,200,000.00	100.00	100.00	Effisien
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	52,200,000.00	100.00	100.00	Effisien
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
15	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	33,649,500.00	100.00	99.48	Effisien
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139,879,000.00	100.00	100.00	Effisien
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	16,730,000.00	100.00	100.00	Effisien
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				
18	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	0.00	0.00	0.00	<i>Dikarenakan Wabah Covid-19</i>
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				
19	Pengembangan BUMDes	1,653,808,800.00	99.99	99.51	Effisien
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				
20	Penyelenggaraan pilkades	0.00	0.00	0.00	<i>Dikarenakan Wabah Covid-19</i>
	Pembinaan Otonomi Desa				
21	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penyusunan APBDes	51,990,300.00	100.00	100.00	Effisien
	JUMLAH / PERSENTASE	2,548,770,546.00		99.24	Effisien

Dari tabel realisasi anggaran kegiatan tahun 2020 dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2020 bahwa tabel tersebut menunjukkan efisiensi dimasing-masing kegiatan.

Pencapaian realisasi keuangan dan fisik diatas 99.24% tidak terlepas dari upaya untuk menjaga konsistensi capaian realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berada pada kinerja 85% atau lebih dari 85% setiap bulannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara tidak langsung berpengaruh pada mekanisme

pemberian *reward* dan *punishment*. Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP PNS) salah satunya mengatur tentang pemberian TPP berdasarkan realisasi keuangan perangkat daerah yang kurang dari 85% setiap bulannya. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap bulannya untuk Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

No	Bulan	Capaian Kinerja	% Penerimaan TPP
1	Januari	100%	100%
2	Februari	100%	100%
3	Maret	100%	100%
4	April	100%	100%
5	Mei	95,65%	100%
6	Juni	95,65%	100%
7	Juli	95,65%	100%
8	Agustus	95,65%	100%
9	September	95,65%	100%
10	Oktober	95,65%	100%
11	November	95,65%	100%
12	Desember	95,65%	100%

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Status Desa	1	Jumlah Kelembagaan teknologi tepat guna dan kelembagaan masyarakat di desa yang dibina	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	Jumlah Kelembagaan Teknologi tepat guna dan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina			
		-	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Peserta PKK dan Posyandu yang dibina	Rp. 0	Rp. 0	0 %
		2	Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang di fasilitasi	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang di fasilitasi			
				Pengembangan BUMDes	Jumlah BUMDes yang berkembang	Rp. 1,653,808,800.00	Rp. 1,645,676,281.00	99.51 %
		3	Jumlah pembinaan paningkatan kapasitas aparatur di desa :	Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah pembinaan paningkatan kapasitas aparatur di desa			
		-	Pelaksanaan Pilkades serentak	Penyelenggaraan Pilkades	Jumlah Desa yg melaksanakan Pilkades Serentak	Rp. 0	Rp. 0	0 %
		4	Jumlah Pembinaan Otonomi Desa :	Program Pembinaan Otonomi Desa	Jumlah Pembinaan Otonomi Desa aparatur Pelaksana DD dan ADD			
-	Pembinaan aparatur pelaksanaan DD dan ADD	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penyusunan APBDes	Jumlah Desa Pelaksana ADD dan Penyusunan APBDes	Rp. 51,990,300.00	Rp. 51,990,300.00	100 %		

BAB IV

PENUTUP

Dalam kerangka Laporan Kinerja (LKJIP) Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean governance*. Instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian dan tujuan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas pembangunan, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu dapat terwujud.

Secara total anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) telah dapat menyerap anggaran sebesar **Rp. 4,640,664,067.00** atau 99,24 %, dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 4,722,480,546.00** yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung telah direalisasi sebesar **Rp. 2,111,260,692.00** atau **97,13** % Dari Pagu Sebesar **Rp. 2,173,710,000.00**.
2. Realisasi anggaran Belanja Langsung telah direalisasi sebesar **Rp. 2,529,403,375.00** atau **99,24%** Dari Pagu Sebesar **Rp 2,548,770,546.00**.

Dalam Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu telah dapat mencapai sasaran yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan yang telah dicapai seharusnya menjadi pendorong bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu untuk lebih meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang. Selama kurun waktu tahun 2019, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu sesuai yang tertuang didalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dokumen APBD murni tahun 2020, terdiri dari 6 Program dengan 25 Kegiatan.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerja, yaitu :

1. Lebih meningkatkan disiplin yang mencakup kepada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak pelaksanaan kegiatan/program dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kerja sama tim / antar bidang sehingga lebih solid dan tidak terjadi pengkotak – kotakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasirpengarayan, Januari 2021

KEPALA DPMPD

KABUPATEN ROKAN HULU

MARGONO, S.Sos. M.Si

NIP. 19710705 199203 1 006

LAMPIRAN

- A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**
- B. REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**
- C. LAMPIRAN SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA**
- D. RENCANA PROGRAM TAHUN 2020**
- E. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020**
- F. MONITORING PROGRAM TAHUN 2020**
- G. MONITORING RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020**
- H. EVALUASI PROGRAM TAHUN 2020**
- I. MATRIK PELAKSANAAN RENCANA AKSI**
- J. MONITORING EVALUASI CAPAIAN TARGET RENCANA AKSI**
- K. MONITORING TERHADAP PENGUKURAN CAPAIAN TARGET
DALAM PERJANJIAN KINERJA**